

IMPLEMENTASI PROGRAM KELUARGA HARAPAN BIDANG PENDIDIKAN DI DESA SELACAI KECAMATAN CIPAKU KABUPATEN CIAMIS

Imelia Alike Mulki¹, Agus Dedi², Endah Vestikowati³

Universitas Galuh, Ciamis, Indonesia^{1,2,3}

E-mail: agusdediide@gmail.com

ABSTRAK

Komunikasi dalam Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Selacai tidak terjalin dengan baik, karena pendamping PKH tidak melibatkan tokoh masyarakat dalam kegiatan, hal ini tidak sesuai dengan Standard Operating Procedures (SOP) pada buku pedoman PKH yang menyebabkan tidak optimalnya proses implementasi program. Dalam penelitian ini penulisan menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif untuk meneliti sejumlah data dan fakta yang diperoleh secara ilmiah dari objek penelitian. Hasil penelitian, komunikasi yang dijalin oleh pendamping PKH, Pemerintah Desa dan masyarakat belum optimal. Sumber daya PKH yang ada sudah sesuai dengan SOP. Disposisi dari para pelaksana sudah diterima dengan baik. Struktur birokrasi PKH sudah cukup baik dan sesuai SOPs. Beberapa hal yang disarankan demi perbaikan Program Keluarga Harapan Bidang Pendidikan Di Desa Selacai Kecamatan Cipaku Kabupaten Ciamis lebih baik dari sisi perbaikan kinerja dan koordinasi yang lebih baik antara elemen pemangku kebijakan, yang bersangkutan dan masyarakat secara umum.

Kata Kunci: *Implementasi Kebijakan, Program Keluarga Harapan, Pendidikan.*

PENDAHULUAN

Kemiskinan menjadi masalah kompleks bagi pemerintah di seluruh dunia. Kemiskinan dihubungkan dengan kemampuan menjalankan suatu fungsi di masyarakat. Pendidikan merupakan hal pokok yang akan menopang kemajuan suatu bangsa, tanpa pendidikan suatu Negara akan jauh tertinggal dari Negara-negara lain. Berdasarkan data dari Badan Penanggulangan Statistik (BPS) yang diambil dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) tahun 2019, masih terdapat anak putus sekolah

disetiap jenjang pendidikan. Target angka putus sekolah pada Renstra Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (kemendikbud) adalah dibawah 1 persen pada masing-masing jenjang pendidikan tersebut.

Agar terhindar dari merosotnya mutu generasi di masa mendatang pemerintah pusat membuat kebijakan berupa Program Keluarga Harapan. PKH berkaitan dengan pemberdayaan keluarga miskin berupa bantuan langsung uang tunai kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM), yaitu Rumah Tangga Sangat Miskin yang

sesuai dengan kriteria, seperti kurang mampu dengan komponen Pendidikan (SD/MI, SMP/MTS, SMA/MA), penyandang disabilitas, lanjut usia, ibu hamil dan balita.

Program Keluarga Harapan bertujuan agar kehidupan keluarga penerima manfaat taraf kehidupannya meningkat melalui akses layanan Pendidikan, kesejahteraan sosial dan kesehatan. Juga meningkatkan pendapatan dan mengurangi pengeluaran keluarga miskin dan rentan. Program Keluarga Harapan terdiri dari beberapa jenis kegiatan program, diantaranya Program Indonesia Pintar (PIP), Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), Kelompok Usaha Bersama (KUBE), Bansos Rastra, Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) dan Program Bantuan Tunai. Dari berbagai jenis kegiatan program ini, penulis fokus pada jenis kegiatan Program Indonesia Pintar (PIP).

Desa Selacai merupakan desa yang terletak di Kecamatan Cipaku Kabupaten Ciamis. Jumlah Penduduk Desa Selacai total mencapai 2.097 Keluarga. Jumlah Keluarga Miskin mencapai 539 keluarga. Jumlah KPM PKH Bidang Pendidikan sebanyak 390 orang. Total KPM PKH di Desa Selacai sebanyak 256 keluarga. Mayoritas masyarakatnya bekerja sebagai petani. (sumber : data PKH 2021)

Dalam program keluarga harapan seharusnya terjalin komunikasi yang baik antara pendamping, pemerintah

desa dan masyarakat yang tertuang pada Buku Pedoman Program Keluarga Harapan (2021:51). Di Desa Selacai komunikasi antara pendamping dengan masyarakat tidak terjalin dengan baik, karena pendamping PKH tidak melibatkan tokoh masyarakat dalam kegiatan PKH, hal ini tidak sesuai dengan SOP pada buku pedoman PKH yang menyebabkan tidak optimalnya proses implementasi program karena implementasi program akan berjalan dengan baik apabila komunikasinya baik. Dan juga komunikasi antara pendamping dengan KPM dalam buku Pedoman PKH harus dilakukan sosialisasi satu bulan sekali namun di lapangan tidak dilakukan satu bulan sekali.

Dalam implementasi program diperlukan sumber daya baik sumber daya manusia maupun non manusia. Sumber daya manusia di Pemerintah Desa Selacai kurang efektif dapat dibuktikan dengan tidak dilakukannya survey kelapangan secara rutin untuk pendataan keluarga miskin. Seharusnya pendataan dilaksanakan secara rutin karena data berubah setiap waktu.

Disposisi/Sikap Pelaksana dalam implementasi program harus bersikap tegas agar KPM taat kepada aturan yang berlaku agar tujuan program tercapai. Di Desa Selacai Disposisi sudah dilaksanakan dengan baik, pendamping bersikap tegas kepada KPM yang melanggar aturan contohnya anak yang kehadiran sekolahnya tidak 80% diberi sanksi berupa penangguhan bantuan.

Salah satu keberhasilan implementasi program, yaitu jika struktur birokrasi jelas dan melaksanakan kegiatan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Di Desa Selacai struktur birokasinya sudah jelas dan berjalan sesuai dengan yang telah ditetapkan.

Dari hasil observasi di Desa Selacai Kecamatan Cipaku Kabupaten Ciamis ditemukan ada beberapa permasalahan diantaranya : Kurangnya komunikasi antara Pendamping Program Keluarga Harapan dengan tokoh masyarakat, hal ini tidak sesuai pada buku pedoman Program Keluarga Harapan tahun 2021. Terlihat dari masih adanya beberapa tokoh masyarakat yang tidak dilibatkan dalam berbagai penyampaian informasi program ini. Target sasaran kurang sesuai dengan kriteria. Dilihat dari masih banyak masyarakat yang sudah memenuhi kriteria miskin yang mempunyai anak usia sekolah namun tidak mendapatkan bantuan PKH begitu juga sebaliknya, ada beberapa masyarakat yang tidak masuk kriteria tersebut tetapi mendapatkan PKH. Data kategori layak tetapi belum mendapatkan bantuan PKH yaitu sebanyak 35 orang. Dan Kurangnya komunikasi dan koordinasi antara pendamping Program Keluarga Harapan dengan Keluarga Penerima Manfaat sehingga kurang efektifnya pelaksanaan Program Keluarga Harapan dilihat dari tidak dilakukannya sosialisasi secara rutin.

Berdasarkan permasalahan diatas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**Implementasi Program Keluarga Harapan Bidang Pendidikan Di Desa Selacai Kecamatan Cipaku Kabupaten Ciamis**”.

KAJIAN PUSTAKA

Penelitian ini dilakukan karena adanya permasalahan-permasalahan yang ditemukan dalam Program Keluarga Harapan Bidang Pendidikan Di Desa Selacai Kecamatan Cipaku Kabupaten Ciamis. Oleh karena itu untuk menganalisis dalam penelitian ini menggunakan pendekatan teori dengan kaidah-kaidah ilmu pemerintahan. Keterkaitan judul penelitian dengan kajian ilmu pemerintahan jika dihubungkan dengan lingkup ilmu pemerintahan maka penulis mengangkat pendapat dari Syafii (2017:23) mengemukakan bahwa :

“Ilmu pemerintahan adalah ilmu yang mempelajari bagaimana melaksanakan pengurusan (eksekutif), pengaturan (legislatif), kepemimpinan dan koordinasi pemerintahan (baik pusat dengan daerah, maupun rakyat dengan pemerintahannya) dalam berbagai peristiwa dan gejala pemerintahan, secara baik dan benar”

Menurut Edward III dalam Agustino (2016:154) ada empat faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi, yaitu:

1. Komunikasi
Komunikasi sangat menentukan keberhasilan implementasi.

Implementasi di katakan efektif apabila para pembuat keputusan mengetahui apa yang mereka kerjakan, ini dapat berjalan apa bila komunikasi berjalan dengan baik sehingga setiap kebijakan atau peraturan implementasi harus di komunikasikan kepada bagian yang tepat.

2. Sumber daya

Implementasi tidak akan efektif apabila implementor kekurangan sumber daya yang di butuh kan dapat berwujud sumber daya manusia maupun sumber daya non manusia.

3. Disposisi

Disposisi atau sikap dari pelaksana kebijakan sangat berpengaruh. Para pelaksana harus mempunyai kemampuan untuk melaksanakan tugasnya, jika tidak maka implementasi tidak bisa di katakan efektif.

4. Struktur birokrasi

Walaupun semua poin di atas sudah terlaksana namun jika struktur birokrasinya mempunyai kelemahan, ini menjadikan sumber daya tidak efektif sehingga menghambat jalannya implementasi. Birokrasi harus mendukung kebijakan yang sudah disahkan dengan cara koordinasi dengan baik.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan rasional dan empiris, sehingga hasil penelitiannya dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Menurut Bogdan dan Taylor dalam Moleong (2017:4) mengemukakan bahwa “metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati”. Sugiyono (2017:9) mengemukakan bahwa :

“Metode penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, (lawan dari eksperimen) dimana peneliti sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi”

Melalui metode diatas maka penulis berusaha mengamati keadaan yang sebenarnya mengenai Implementasi Program Keluarga Harapan Bidang Pendidikan Di Desa Selacai kecamatan Cipaku kabupaten Ciamis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Desa Selacai menjadi salah satu desa di kabupaten ciamis yang menjalankan program keluarga harapan. Program keluarga harapan ini sangat penting dalam memenuhi kebutuhan pokok masyarakat kurang mampu.

Untuk mengetahui lebih jauh dan mendetail mengenai implementasi

program keluarga harapan bidang pendidikan di desa selacai kecamatan cipaku adapun teori yang digunakan untuk menganalisis permasalahan tersebut adalah teori menurut Edward III dalam Agustino (2016:154), mengungkapkan ada empat factor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan, yaitu :

- 1). Komunikasi
- 2). Sumber Daya
- 3). Disposisi/ Sikap Pelaksana
- 4). Struktur Birokrasi

Kemudian untuk mengetahui Implementasi program keluarga harapan bidang pendidikan di desa selacai kecamatan cipaku kabupaten ciamis, berikut ini akan dijelaskan mengenai hasil wawancara dan pembahasannya.

1. Komunikasi

a. Adanya komunikasi yang baik antara pemerintah desa, pendamping PKH dan masyarakat

Berdasarkan hasil analisis saya mengenai komunikasi yang dijalin oleh pendamping PKH, Pemerintah Desa dan masyarakat dalam pelaksanaan program keluarga harapan bidang pendidikan sudah dilaksanakan hanya saja belum optimal. Dilihat dari tujuan PKH adalah untuk membantu meningkatkan kehidupan KPM terutama dalam bidang akses layanan pendidikan. Hal terpenting dalam program ini yaitu KPM dapat menyekolahkan anak-anaknya minimal sampai pendidikan dasar. Namun peneliti melihat tidak semua

masyarakat mengetahui akan program ini. Pengetahuan masyarakat tentang PKH hanya ketika masyarakat yang bersangkutan atau penerima program ini saja yang mengetahui akan adanya program keluarga harapan (PKH).

Berdasarkan hasil observasi melihat dari komunikasi antara pendamping PKH dan Pemerintah Desa sudah berjalan baik ditandai dengan adanya pemberitahuan dan laporan bulanan hasil kegiatan program kepada pemerintah desa. Namun komunikasi antara pendamping PKH dengan masyarakat belum optimal karena masyarakat yang tidak mendapatkan bantuan PKH tidak mengetahui mengenai pelaksanaan program tersebut.

Yang menjadi penghambat diantaranya masyarakat yang tidak mendapatkan bantuan PKH tidak mengetahui mengenai pelaksanaan program tersebut, Upaya untuk mengatasi hambatan sudah ditempuh dengan beberapa upaya diantaranya melalui publikasi yang dilakukan dalam beberapa forum musyawarah desa.

b. Adanya kejelasan komunikasi antara pendamping PKH dengan masyarakat

Berdasarkan hasil penelitian terhadap informan dari pendamping PKH, pemerintah desa, KPM dan masyarakat yang tidak mendapatkan bantuan PKH menyebutkan bahwa kejelasan informasi mengenai Program Keluarga harapan yang disampaikan oleh pendamping PKH belum cukup

jelas. Masyarakat berharap informasi mengenai Program keluarga harapan ini dapat disampaikan dengan jelas.

Berdasarkan hasil observasi dilapangan mengenai kejelasan komunikasi antara pendamping PKH dengan masyarakat di Desa Selacai terutama bagi masyarakat yang tidak menerima manfaat belum transparan dan terbuka sehingga sering muncul tanggapan negatif dari sebagian masyarakat terutama yang bukan penerima manfaat program tersebut.

c. Adanya pendampingan PKH oleh pendamping PKH terhadap keluarga penerima manfaat

Berdasarkan hasil analisis saya mengenai pendampingan program keluarga harapan memang sudah menjadi tugas pendamping PKH sesuai tugas dan fungsinya. Menjelaskan kepada keluarga penerima manfaat mengenai hal dari program yang kurang dimengerti agar target yang direncanakan oleh pendamping PKH tercapai.

Berdasarkan hasil observasi dilapangan, peneliti menemukan bahwa pendamping PKH telah berusaha semaksimal mungkin dengan menjalin komunikasi yang baik, melalui pertemuan rutin bulanan terutama menjelang pencairan program secara triwulan, yang membahas tentang sosialisasi regulasi dan kebijakan terbaru mengenai program PKH, juga komunikasi dijalin secara virtual melalui grup whatsapp pendamping dan ketua kelompok KPM.

2. Sumber Daya

a. Jumlah pendamping PKH yang mencukupi sesuai SOP's

Berdasarkan hasil analisis saya mengenai jumlah pendamping PKH di Desa Selacai sudah sesuai dengan SOP yang berlaku. Hal ini ditandai dengan semua Keluarga Penerima Manfaat terlayani dengan baik dan masyarakat memberikan respon yang positif.

Berdasarkan hasil observasi di lapangan jumlah pendamping PKH di Desa Selacai sudah sesuai dengan SOP Dinas Sosial Kabupaten Ciamis Tahun 2021 tentang Standar Operasional Prosedur Bidang Bantuan dan Perlindungan Sosial bagian SOP Pendampingan Program Keluarga Harapan (PKH), diantara isinya adalah jumlah pendamping PKH sesuai dengan jumlah KPM yaitu satu orang pendamping minimal mendampingi 250 KPM maksimal 300 KPM PKH. Di Desa Selacai pendamping PKH berjumlah 1 orang karena jumlah KPM PKH berjumlah 256 KPM.

b. Adanya informasi dari pendamping mengenai cara melaksanakan program

Berdasarkan hasil analisis saya mengenai adanya informasi dari pendamping mengenai cara melaksanakan Program Keluarga Harapan kepada Keluarga Penerima Manfaat sudah dijalankan dengan baik, dilihat dari setiap pertemuan yang diadakan, pendamping PKH selalu memberikan informasi terkait pelaksanaan PKH yang baik agar tercapainya tujuan PKH.

Berdasarkan hasil observasi saya ditemukan bahwa dalam setiap kegiatan pertemuan pendamping PKH selalu menyampaikan informasi secara lisan maupun materi tertulis kepada KPM sesuai dengan rencana yang sudah diatur oleh pendamping PKH mengenai informasi regulasi dan kebijakan program PKH.

c. Adanya kewenangan dari pemerintah desa terhadap pelaksanaan PKH

Berdasarkan analisis saya mengenai kewenangan dari pemerintah desa terhadap pelaksanaan Program Keluarga Harapan Pemerintah Desa Selacai sudah berusaha memberikan kewenangan agar pelaksanaan program PKH berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan.

Berdasarkan hasil observasi dilapangan, ditemukan adanya perbedaan dengan hasil wawancara, pada kenyataannya pemerintah desa selacai hanya mengusulkan daftar calon keluarga penerima manfaat kepada dinas sosial kabupaten ciamis, sedangkan proses penyeleksian KPM PKH yang berujung pada penentuan KPM pererima dan pencairan PKH Pemerintah Desa Selacai tidak ikut andil. Dilihat dari adanya KPM yang tidak memenuhi kriteria atau sudah memenuhi harapan tetapi mendapatkan bantuan tersebut, sedangkan ada beberapa keluarga yang sudah memenuhi kriteria tetapi tidak mendapatkan manfaat PKH, seolah Pemerintah Desa Selacai angkat tangan karena merasa sudah mengusulkan

tetapi penentuan oleh Pemerintah yang lebih atas (DINSOS, Provinsi dan Kemensos).

Yang menjadi penghambat adalah pemerintah desa selacai tidak ikut andil dalam proses penyeleksian KPM PKH. Upaya yang sudah dilakukan diantaranya Pemerintah Desa Selacai sudah berusaha memberikan kewenangan agar pelaksanaan program PKH berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan.

d. Adanya fasilitas yang diberikan pemerintah desa kepada pendamping PKH dan masyarakat

Berdasarkan hasil observasi yang telah dilakukan pemerintah desa selacai sudah memberikan fasilitas aula desa untuk pertemuan besar, balai dusun dan posyandu untuk pertemuan kelompok.

Keseluruhan fasilitas (sarana dan prasarana) yang diberikan pemerintah desa kepada pendamping PKH dan masyarakat di Desa Selacai Kecamatan Cipaku Kabupaten Ciamis berdasarkan hasil wawancara dan observasi lapangan dapat disimpulkan bahwa fasilitas (sarana dan prasarana) yang ada sudah terfasilitasi dengan baik, menggambarkan implementasi dari sumber daya yang ada sudah efektif dan implementatif, yang menggunakan fasilitas pemerintah desa yang ada baik balai dusun maupun aula desa.

3. Disposisi / Sikap Pelaksana

a. Adanya pengetahuan tentang PKH dari para pelaksana

Berdasarkan analisis dari wawancara tersebut bahwa pandangan

terhadap program keluarga harapan di desa selalai diterima dengan baik oleh para pelaksana terutama pemerintah desa, karena program keluarga harapan ini apabila dioptimalkan akan membantu keluarga kurang mampu dalam bidang pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial.

Berdasarkan hasil observasi dilapangan sesuai dengan SOP Dinas Sosial Kabupaten Ciamis Tahun 2021 tentang Standar Operasional Prosedur Bidang Bantuan dan Perlindungan Sosial bagian SOP Pendampingan Program Keluarga Harapan (PKH), saya menemukan para pelaksana terutama pendamping PKH Desa Selalai telah memahami mengenai program keluarga harapan, ini sangat berpengaruh terhadap jalannya program.

Program keluarga harapan ini dilaksanakan semata-mata karena ingin membantu keluarga kurang mampu yang dalam pelaksanaannya memerlukan kekompakan dan keselarasan antara agen pelaksana.

b. Adanya kemampuan, kapabilitas dan kompetensi dari Pemerintah Desa

Berdasarkan hasil analisa dari wawancara kemampuan, kapabilitas dan kompetensi pemerintah desa kurang maksimal. Pemerintah desa hanya menerima perintah tanpa mengembangkan kemampuan, kapabilitas dan kompetensi yang ada.

Berdasarkan hasil observasi saya menemukan bahwa pemerintah desa dalam perbaikan data secara berkala

untuk memutakhirkan daftar usulan kurang kompeten terutama dari data yang diusulkan dengan data yang ditetapkan oleh pemerintah melalui dinas sosial belum bisa menemukan solusi (data penerima dengan usulan tetap tidak sinkron). Hal ini ditandai adanya masyarakat yang sudah memenuhi kriteria penerima manfaat namun belum juga mendapatkan bantuan dari pkh.

Yang menjadi hambatan adalah Pemerintah desa hanya menerima perintah tanpa mengembangkan kemampuan, kapabilitas dan kompetensi yang ada. Pemerintah desa selalai tidak menerima insentif apapun dari program keluarga harapan, hanya menerima gaji sebagai pegawai desa. Upaya yang telah dilakukan adalah musyawarah desa dalam pemutakhiran data kemiskinan desa secara berkala sebagai rujukan dan pembanding yang melibatkan unsur masyarakat, Pendamping PKH dan pihak lainnya. Dengan adanya program desa mengenai pemutakhiran data kemiskinan desa, ada anggaran khusus misalkan pendataan SDGs desa dan sebagainya.

c. Adanya insentif untuk pelaksana

Berdasarkan hasil analisis dari wawancara pemerintah desa selalai tidak menerima insentif apapun dari program keluarga harapan, hanya menerima gaji sebagai pegawai desa. Namun pendamping PKH mendapat insentif berupa honor dari kementerian sosial karena tugasnya sebagai

mendampingi program keluarga harapan.

Berdasarkan hasil observasi yang saya temukan dilapangan bahwa pendamping PKH mendapatkan honor dari kementerian sosial langsung karena telah menjalankan tugasnya. Sedangkan untuk pemerintah desa tidak ada insentif khusus, karena itu sudah menjadi tugas dan fungsi pemerintah desa.

4. Struktur Birokrasi

a. Kegiatan-kegiatan sesuai dengan Standar Oprating Procedures (SOPs)

Berdasarkan hasil analisis saya kegiatan program keluarga harapan sudah berjalan dan sesuai dengan *Standar Oprating Procedures* (SOPs) yang diakui dengan adanya persiapan yang matang dan koordinasi yang terjalin baik antara Petugas PKH, Pemerintah Desa dan KPM PKH terkait. Diakui oleh beberapa informan bahwa kegiatan selalu terencana dan terlaksana dengan baik, mulai dari pemberitahuan melalui surat undangan kepada KPM dan tembusan/pemberitahuan kepada Pemerintah Desa.

Berdasarkan hasil observasi kegiatan program keluarga harapan di desa selacai telah berusaha untuk sesuai dengan SOP dibuktikan dengan adanya tertib administrasi dan informasi yang baik yang terlihat dari dokumen administrasi berupa surat dan pelaporan program.

b. Adanya tanggung jawab dari pendamping PKH kepada

pemerintah desa mengenai kegiatan yang dilaksanakan

Berdasarkan hasil analisis saya dari wawancara bahwa pendamping PKH desa selacai telah melaporkan setiap selesai kegiatan secara berkala yaitu laporan bulanan. Laporan tersebut diberikan kepada pemerintah melalui koordinator kecamatan dan dinas sosial.

Berdasarkan hasil observasi program keluarga harapan di desa selacai telah berusaha untuk memenuhi tanggung jawab programnya dibuktikan dengan adanya pelaporan administrasi yang lengkap secara berkala dan berjenjang.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang Implementasi Program Keluarga Harapan Bidang Pendidikan Di Desa Selacai Kecamatan Cipaku Kabupaten Ciamis, dapat diuraikan kesimpulan sebagai berikut :

1. Komunikasi antara pendamping PKH dengan masyarakat belum optimal karena masyarakat yang tidak mendapatkan bantuan PKH tidak mengetahui mengenai pelaksanaan program tersebut.
2. Sumber daya PKH yang ada sudah sesuai dengan SOP, tetapi belum efektif dan implementatif. adanya KPM yang tidak memenuhi kriteria atau sudah memenuhi harapan tetapi mendapatkan bantuan tersebut, sedangkan ada beberapa keluarga yang sudah memenuhi kriteria tetapi tidak mendapatkan manfaat PKH.

3. Disposisi belum cukup baik, perbaikan data secara berkala untuk memutakhirkan daftar usulan kurang kompeten terutama dari data yang diusulkan dengan data yang ditetapkan oleh pemerintah melalui dinas sosial belum bisa menemukan solusi (data penerima dengan usulan tetap tidak sinkron).
4. Struktur birokrasi PKH sudah cukup baik dan sesuai SOPs, menggambarkan implementasi dari struktur birokrasi yang ada cukup efektif dan implementatif. pendamping PKH desa selasai telah melaporkan setiap selesai kegiatan secara berkala yaitu laporan bulanan. Laporan tersebut diberikan kepada pemerintah melalui koordinator kecamatan dan dinas sosial.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku

- Agustino, Leo. 2016. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik Edisi Revisi Ke-2*. Bandung : Alfabeta.
- Kementrian Sosial RI. 2021. *Pedoman Pelaksanaan Program Keluarga Harapan Tahun 2021*. Direktorat Jenderal Jaminan Sosial : Jakarta.
- Moleong, Lexy. J. 2017. *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*.

Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.

- Syafii, Inu Kencana. 2017. *Pengantar Ilmu Pemerintahan*. Bandung : PT Refika Aditama.

Sumber Undang-Undang

- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial.
- Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan.
- Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Progra

Jurnal Ilmiah

- Vestikowati, Endah. 2015. *Implementasi Program Keluarga Harapan Oleh Pelaksana Program Keluarga Harapan Tahun Anggaran 2011-2015 Di Desa Wonoharjo Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran*. Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik. Universitas Galuh.
- Yulianti. 2014. *Tahapan Dalam Siklus Kebijakan Publik*. Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik. Universitas Jendral Soedirman.